

# Strategi efisiensi operasional bank syariah dalam meningkatkan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

**Roudatul Hasanah**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [raudatulhasanah118@gmail.com](mailto:raudatulhasanah118@gmail.com)

## Kata Kunci:

Strategi, efisiensi operasional, pembiayaan, bank syariah, UMKM

## Keywords:

Strategy, operational efficiency, financing, Islamic banks, MSME

## ABSTRAK

Artikel ini membahas strategi efisiensi operasional bank syariah untuk meningkatkan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Bank syariah, yang beroperasi sesuai prinsip syariah tanpa riba, memiliki potensi besar dalam mendukung UMKM yang menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, banyak UMKM menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal. Penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional bank syariah dapat secara signifikan meningkatkan pembiayaan untuk UMKM. Beberapa strategi yang diusulkan meliputi digitalisasi layanan, pemanfaatan fintech syariah, penyederhanaan

proses kerja, serta penggunaan big data dan kecerdasan buatan untuk penilaian risiko. Selain itu, pentingnya penguatan iklim usaha, peningkatan kapasitas kewirausahaan, dan pengembangan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM juga ditekankan. Inisiatif yang diambil oleh bank syariah, seperti digitalisasi proses pengajuan dan penerapan teknologi otomatisasi, diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan terjangkau, mendukung pertumbuhan UMKM, serta berkontribusi pada perekonomian lokal. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga berperan penting dalam mendukung UMKM, meskipun mereka menghadapi tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan manajemen. Pengelolaan risiko dalam pembiayaan UMKM menjadi sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas dan efisiensi operasional sangat diperlukan bagi bank syariah dalam mencapai tujuan strategis dan meningkatkan daya saing di pasar.

## ABSTRACT

This article discusses the operational efficiency strategies of Islamic banks to increase financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Islamic banks, which operate according to sharia principles without usury, have great potential in supporting MSMEs that contribute around 60% of the national Gross Domestic Product (GDP). However, many MSMEs face difficulties in accessing formal financing. This study shows that operational efficiency of Islamic banks can significantly increase financing for MSMEs. Some of the proposed strategies include digitizing services, utilizing Islamic fintech, simplifying work processes, and using big data and artificial intelligence for risk assessment. In addition, the importance of strengthening the business climate, increasing entrepreneurial capacity, and developing financing products that are in accordance with the needs of MSMEs is also emphasized. Initiatives taken by Islamic banks, such as digitizing the application process and implementing automation technology, are expected to provide faster and more affordable services, support MSME growth, and contribute to the local economy. Microfinance Institutions (MFIs) also play an important role in supporting MSMEs, although they face internal challenges such as limited human resources and



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

management. Risk management in UMKM financing is very important to reduce the possibility of bad debts. Therefore, measuring operational effectiveness and efficiency is very necessary for Islamic banks in achieving strategic goals and increasing competitiveness in the market.

---

## Pendahuluan

Perbankan syariah lembaga yang bertindak sebagai *financial immediately* yang saat ini lebih dikenal sebagai bank. Hadirnya bank syariah di Indonesia memberikan peluang yang sangat besar bagi sektor perbankan syariah, hal ini dikarenakan penduduk di Indonesia mayoritas beragama islam. Dan prinsip-prinsip yang digunakan bank syariah sesuai syariat agama islam yang mana bank syariah beroperasi dengan prinsip tanpa adanya riba dan dikembangkan sesuai dengan al-qur'an dan hadits. Perkembangan industri dalam perbankan syariah berkembang dengan sangat cepat, namun dalam perjalanannya industri perbankan syariah pasti akan menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Namun, setiap bank syariah harus memiliki keunggulan untuk pelanggannya, seperti persaingan di antara nasabah, fasilitas, dan layanan (Werdi Apriyanti, 2018).

Perbankan syariah menawarkan berbagai jenis produk yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang menguntungkan bukan hanya pada pelanggan tetapi juga kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Produk-produk utama perbankan syariah ialah termasuk tabungan syariah, giro syariah, dan deposito syariah, serta berbagai skema pembiayaan seperti Murabahah (jual beli dengan margin), Musyarakah (mitra usaha), dan Mudharabah (bagi hasil). Tujuan perbankan syariah adalah untuk memastikan bahwa Pembiayaan dari bank syariah menawarkan solusi yang fleksibel dan etis bagi UMKM. Produk pembiayaan syariah seperti Murabahah atau Musyarakah dapat memanfaatkan skema pembagian keuntungan dan risiko yang lebih adil. Produk pembiayaan syariah sangat membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka tanpa terbebani oleh bunga tinggi serta mendapatkan pendampingan dan pelatihan dari bank syariah. Dengan demikian, produk pembiayaan syariah tidak hanya mendukung pertumbuhan bisnis mereka, tetapi juga membantu mereka mencapai kestabilan dan keberlanjutan finansial (Susila, 2017).

Menurut (Ermawijaya, 2018), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang sekitar 60% dari PDB nasional dan menyediakan lebih dari 97% tenaga kerja di kedua sektor ekonomi formal dan informal. Namun, salah satu masalah utama yang dihadapi UMKM adalah kurangnya akses ke pembiayaan formal. Menurut (Rahmatullah, 2022) data menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% UMKM memiliki akses ke lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kemungkinan berkembangnya UMKM dan dukungan pembiayaan yang diberikan khususnya perbankan syariah.

Adapun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa optimalisasi operasional bank syariah memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pembiayaan dalam UMKM. Penelitian oleh (Mamun & Ningsih, 2021) menyatakan bahwa penerapan digital banking

dalam bank syariah mampu menurunkan biaya operasional hingga 20%, yang pada gilirannya memungkinkan bank untuk menyalurkan lebih banyak pembiayaan kepada UMKM. Sementara itu, menurut (Pramono, 2013) menemukan bahwa inovasi produk bank syariah berbasis bagi hasil seperti Mudharabah dan Musyarakah membantu meningkatkan daya saing UMKM dengan pembagian risiko yang lebih adil.

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan laporan penelitian mengenai efisiensi operasional bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi yang dapat diterapkan bank syariah dalam meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung pembiayaan UMKM secara berkelanjutan melalui analisis literatur yang sudah ada.

## **Pembahasan**

### **Efisiensi Operasional dalam Bank Syariah**

Efisiensi operasional merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk menjalankan operasionalnya (Budi gautama Siregar et al., 2023). Dalam perbankan syariah, efisiensi operasional berarti kemampuan bank dalam memanfaatkan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga secara optimal. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan keuangan yang cepat dan akurat tanpa membuang sumber daya. Proses tersebut harus selalu mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan transparansi, serta menghindari riba. Efisiensi dalam sistem perbankan syariah memastikan semua langkah, mulai dari permintaan pembiayaan hingga pencairan dana, diselesaikan dengan cepat tanpa melanggar aturan syariah.

Faktor penunjang efisiensi dalam bank syariah meliputi beberapa aspek penting yaitu (1) Penggunaan teknologi dalam Bank syariah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional. Bank syariah juga dapat mempercepat pengajuan dan meningkatkan akurasi dengan menggunakan perangkat lunak dan aplikasi mobile. Digitalisasi layanan juga memungkinkan pelanggan mengakses layanan secara online, yang membuatnya lebih mudah dan mengurangi biaya transaksi manual. (2) Bank syariah dapat mempercepat pelayanan dan mengurangi kesalahan dengan menyederhanakan proses internal. Semua pelanggan mendapatkan layanan yang sama karena standar prosedur yang diterapkan di seluruh cabang mendapatkan pelayanan yang serupa. (3) Pengelolaan sumber daya manusia juga penting agar pelatihan yang tepat akan meningkatkan produktivitas, dan juga pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian karyawan memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan dengan baik. (4) Bank syariah dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan produk dan layanan melalui pengurangan pemborosan dan pengelolaan sumber daya yang efektif.

Manfaat efisiensi operasional bagi bank syariah sangat penting dengan meningkatkan efisiensi, bank dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan berkualitas, sehingga menjadi lebih kompetitif di pasar. Selain itu, dengan mengurangi

biaya operasional, bank dapat menawarkan produk pembiayaan dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya bagi nasabah UMKM. Proses yang lebih efisien juga membantu bank menjangkau lebih banyak nasabah di sektor UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

### Inisiatif Efisiensi Operasional di Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan efisiensi operasional, terutama dalam konteks digitalisasi dan inovasi teknologi. Di antara beberapa inisiatif tersebut yaitu: **Pertama**, Digitalisasi proses pengajuan pendanaan dan layanan nasabah yang berarti mengganti proses manual dengan teknologi digital. Berdasarkan hukum Syariah, hal ini dilakukan melalui platform online atau aplikasi seluler yang memungkinkan nasabah mengajukan pembiayaan dan mengakses layanan kapan saja, dan di mana saja. Proses tersebut menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau. Selain menghemat waktu dan biaya, digitalisasi juga meningkatkan kenyamanan nasabah dan efisiensi perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. **Kedua**, Bank syariah menggunakan fintech syariah dan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi. Fintech syariah memungkinkan bank menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan tanpa riba, dengan lebih mudah diakses melalui platform digital. Bank dapat mempercepat proses seperti pemrosesan transaksi, analisis data, dan penilaian risiko. Dengan menggunakan teknologi otomatisasi ini dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual, menghemat waktu, dan mengurangi kesalahan manusia. Dan pada akhirnya, akan meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. **Ketiga**, Penerapan Metode kerja yang efisien di bank syariah adalah pendekatan untuk meningkatkan efisiensi dengan menyederhanakan proses kerja. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah waktu, biaya, dan sumber daya yang tidak digunakan tanpa mengurangi kualitas layanan. Untuk mencapai hal itu bank syariah menghilangkan proses yang tidak perlu, mempercepat alur kerja, dan mengoptimalkan produktivitas karyawan. Proses yang lebih efisien ini membantu bank memberikan layanan lebih cepat, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengoptimalkan sumber daya dengan mematuhi pada prinsip-prinsip syariah. **Keempat**, Penggunaan big data dan AI mempercepat dan mengoptimalkan penilaian risiko dan pembiayaan di bank syariah. Big data adalah teknologi yang memungkinkan bank mengumpulkan dan menganalisis informasi yang sangat besar tentang pelanggan, seperti riwayat keuangan, perilaku transaksi, dan preferensi produk. Dengan menggunakan data yang mendalam ini, bank dapat membuat keputusan yang lebih akurat dalam menawarkan produk pembiayaan. Misalnya, bank syariah dapat menyesuaikan produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan unik pelanggan, yang menghasilkan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kecerdasan buatan (AI) cepat dan akurat memproses informasi, terutama untuk mengevaluasi risiko yang terkait dengan pengajuan pembiayaan. Pola-pola dalam data nasabah yang mungkin terlewatkan oleh analisis manual ialah memudahkan bank untuk membuat keputusan apakah seorang nasabah layak mendapatkan pembiayaan (Billytona et al., 2024).

## Strategi Produk Pembiayaan untuk UMKM

**Pengembangan Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM:** Menurut (Fitriasari, 2017) peran mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Untuk mendukung hal ini, diperlukan strategi dan program jelas dari pemerintah. Bank Indonesia, perbankan, lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat harus memiliki strategi dan program yang jelas untuk mendukung hal itu. Strategi untuk meningkatkan pembiayaan UMKM mencakup: 1) meningkatkan lingkungan usaha dan investasi, 2) meningkatkan kapasitas kewirausahaan, 3) memperkuat sektor keuangan, terutama perbankan, 4) menciptakan layanan pembiayaan, dan 5) meningkatkan peran koperasi dan lembaga keuangan mikro. Penguatan iklim usaha dapat dilakukan melalui perbaikan regulasi, akses informasi, dan tata kelembagaan. Program pemberdayaan UMKM harus berorientasi pasar dan memenuhi kebutuhan riil untuk meningkatkan produktivitas. Contoh program ini termasuk penyempurnaan regulasi, kemudahan formalitas badan usaha, kelancaran arus barang, dan layanan perizinan yang cepat dan murah. Peningkatan koordinasi kebijakan juga penting untuk peningkatan koordinasi kebijakan UMKM, serta penyebaran informasi yang luas dan berkualitas.

**Penguatan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif:** Penguatan iklim usaha dan investasi yang kondusif dapat dicapai dengan memperbaiki kelembagaan UMKM, merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan yang tepat, memperbaiki kerangka aturan di tingkat nasional dan daerah, serta meningkatkan akses informasi bagi UMKM dan pemangku kepentingan. Lingkungan usaha yang tidak mendukung menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan inefisiensi. Selain menciptakan lingkungan yang mendukung, pengembangan UMKM harus berorientasi pada pasar dan kebutuhan riil, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Program pemberdayaan UMKM mencakup: perbaikan regulasi, mempermudah legalisasi usaha, kelancaran distribusi barang dan jasa, peningkatan kapasitas aparat, pengembangan perizinan terpadu, advokasi dan mediasi, penilaian dampak regulasi, serta koordinasi dan penyebaran informasi yang lebih baik.

**Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan kegiatan usaha:** Peningkatan kemampuan kewirausahaan, manajemen, keterampilan teknis, inovasi, serta perencanaan keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Saat ini, kurangnya wirausaha produktif dan kompetitif menjadi tantangan utama. Untuk mengatasi ini, program pemberdayaan UMKM mencakup beberapa langkah: pemasyarakatan kewirausahaan melalui pendidikan dan insentif, dukungan teknologi, kesadaran Hak dan lingkungan, pengembangan jaringan kewirausahaan, inkubator bisnis, kemitraan investasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk distribusi, serta peningkatan kualitas wirausaha, termasuk pengusaha wanita, agar lebih tangguh dan kooperatif.

**Penguatan sektor keuangan khususnya perbankan dalam masalah pembiayaan (perkedritan perbankan):** Beberapa masalah yang dihadapi UMKM dalam perbankan antara lain: prosedur kredit yang rumit, syarat agunan yang mengesampingkan kelayakan usaha, suku bunga tinggi, serta kurangnya pembinaan dalam manajemen

keuangan. Meskipun pemerintah telah menawarkan berbagai skim kredit, banyak UMKM masih kesulitan mengaksesnya. Untuk mengatasi ini, Bank Indonesia (BI) melonggarkan aturan kredit bagi UMKM, dengan fokus pada kemampuan membayar, keringanan bagi perusahaan terdampak bencana, dan pemberian kredit pada unit usaha sehat dalam holding bermasalah. Pemerintah juga memperkuat Askrindo dengan modal Rp 1,4 triliun untuk menjamin kredit UMKM. Program pemberdayaan UMKM meliputi: kemudahan memulai usaha, alternatif pembiayaan tanpa agunan, koordinasi pendanaan, dukungan LKM, pelatihan kewirausahaan, pengembangan jaringan usaha, penguatan koperasi, dan pengembangan usaha mikro di daerah tertinggal.

**Pengembangan perangkat penunjang bagi peningkatan pembiayaan:** UMKM masih memerlukan dukungan penjaminan kredit agar akses pembiayaan menjadi lebih optimal. Penjaminan keuangan merupakan perjanjian pihak ketiga untuk menutup sebagian kerugian apabila peminjam gagal melunasi pinjaman. Di Indonesia, beberapa lembaga penjaminan seperti Perum Sarana, PT PKPI, dan PT ASKRINDO telah berperan dalam membantu UMKM, namun kapasitasnya masih terbatas. Pemerintah terus meningkatkan dana penjaminan UMKM, yang pada tahun 2008 mencapai Rp 851 miliar, guna memperluas dukungan bagi sektor tersebut. Peneliti merekomendasikan agar bank syariah dilibatkan dalam program penjaminan kredit UMKM, serta pemerintah daerah turut menyediakan program penjaminan syariah dari dana APBD. Menurut (Dessy et al., 2024), integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan modal kerja dan keputusan pembiayaan mampu menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, termasuk dalam mendukung pemberdayaan sektor UMKM. Program pemberdayaan tersebut mencakup pengurangan hambatan akses terhadap sumber daya, peningkatan partisipasi dunia usaha dalam penyediaan layanan teknologi dan manajemen, kemudahan perizinan, perluasan sumber pembiayaan, penguatan jaringan pasar, serta pengembangan pelatihan dan riset UMKM.

**Peningkatan peran Lembaga Keuangan Mikro dan Layanan KSP/USP Koperasi:** Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM yang kesulitan mengakses lembaga keuangan formal. LKM terbagi menjadi lembaga formal dan non-formal, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LKM dinilai efektif dalam memberikan modal usaha karena kedekatannya dengan nasabah serta kemampuannya menawarkan pelayanan yang cepat dan fleksibel. Namun, di sisi lain, LKM juga menghadapi berbagai permasalahan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya manajemen, kurangnya permodalan, serta rendahnya inovasi dan jaringan kelembagaan. Menurut (Saputra et al., 2023), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai salah satu bentuk LKM syariah berperan signifikan dalam mendukung inklusi keuangan berbasis prinsip Islam, meskipun masih membutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan, inovasi digital, dan profesionalisme pengelolaan. Program perkuatan modal melalui dana bergulir terus dilanjutkan untuk memperkuat layanan koperasi (KSP/USP) serta mendorong perkembangan UMKM. Selain itu, linkage program antara koperasi dan bank umum terbukti meningkatkan kepercayaan terhadap koperasi. Strategi penguatan LKM dan

koperasi mencakup penyempurnaan undang-undang, peningkatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, serta dukungan modernisasi manajemen dan infrastruktur koperasi (Rifki et al., 2024).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk UMKM yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal. LKM dibagi menjadi formal dan non-formal, seperti BPR, KSP, BMT, dan LSM. LKM efektif dalam memberikan modal karena dekat dengan nasabah dan menawarkan pelayanan cepat. Namun, LKM menghadapi masalah internal seperti keterbatasan SDM, manajemen, permodalan, serta lemahnya jaringan dan inovasi. Program perkuatan modal melalui dana bergulir masih dilanjutkan untuk memperkuat layanan koperasi (KSP/USP) dan mendukung UMKM. Linkage program antara koperasi dan bank umum juga meningkatkan kepercayaan terhadap koperasi. Strategi penguatan LKM dan koperasi mencakup penyempurnaan undang-undang, peningkatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, serta dukungan modernisasi manajemen dan infrastruktur koperasi (Rifki et al., 2024).

### **Pengelolaan Risiko Pembiayaan UMKM**

Menurut (Suri & Berliana, 2023) pengelolaan Risiko Pembiayaan UMKM merupakan serangkaian tindakan yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola berbagai risiko yang mungkin muncul dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sektor UMKM seringkali dianggap berisiko karena menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya aset untuk dijadikan agunan, kelemahan dalam manajemen keuangan, serta ketidakpastian kondisi pasar. Oleh karena itu, pengelolaan risiko menjadi sangat penting untuk menilai kelayakan usaha dan mengurangi risiko terjadinya kredit macet atau gagal bayar.

Ada beberapa langkah dalam pengelolaan pembiayaan UMKM yaitu: (1) Identifikasi Risiko: Risiko tersebut bisa meliputi risiko kredit, di mana ada kemungkinan UMKM tidak mampu membayar kembali pinjamannya; risiko pasar, di mana ketidakstabilan ekonomi dapat memengaruhi daya jual dan operasional usaha; serta risiko operasional, seperti kurangnya kapasitas manajerial di dalam UMKM yang berpotensi menyebabkan masalah dalam pengelolaan bisnis. (2) Analisis Risiko: Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kemampuan keuangan UMKM, prospek usaha, kondisi pasar, dan faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi usaha. Hasil dari analisis ini akan membantu memutuskan apakah UMKM tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. (3) Mitigasi Risiko: pencegahan atau pengurangan risiko diterapkan. Contohnya termasuk pemberian jaminan alternatif bagi UMKM yang tidak memiliki agunan tradisional, penerapan sistem penjaminan kredit untuk mengurangi beban risiko lembaga keuangan, serta pendampingan kepada UMKM untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen usahanya agar lebih efisien dan sehat. (4) Pemantauan dan Evaluasi: Setelah pembiayaan disalurkan, diperlukan pemantauan yang berkala terhadap kinerja usaha UMKM yang dibiayai. Lembaga keuangan harus terus mengevaluasi perkembangan usaha dan mengidentifikasi potensi perubahan risiko. Selain itu, penggunaan dana oleh UMKM juga perlu diawasi untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati (Suretno & Bustam, 2020).

## Pengukuran Efektivitas Efisiensi Operasional

Menilai kinerja organisasi secara menyeluruh memerlukan pengukuran yang tepat terhadap efektivitas dan efisiensi operasional, yang merupakan dua elemen penting dalam mencapai tujuan strategis organisasi. Efektivitas mengacu pada kemampuan organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan tepat waktu dan sesuai harapan, mencerminkan kualitas layanan dan kepuasan yang diberikan kepada pelanggan (Jefry Katili, 2013). Sementara itu, efisiensi berfokus pada pemanfaatan sumber daya, termasuk biaya, waktu, dan tenaga, secara optimal untuk menghasilkan output yang diharapkan. Penelitian (Safitri & Zulfa, 2022) menegaskan bahwa faktor budaya organisasi juga memengaruhi kinerja karyawan, di mana kepuasan kerja berperan sebagai mediator yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional dalam institusi perbankan syariah.

Dengan demikian, organisasi yang efektif adalah yang mampu mencapai sasaran strategisnya, sementara organisasi yang efisien adalah yang dapat melakukannya dengan meminimalkan penggunaan sumber daya. Kombinasi antara efektivitas dan efisiensi yang baik sangat penting untuk memastikan daya saing, menyempurnakan proses operasional, serta memaksimalkan keuntungan di tengah persaingan dan perubahan yang cepat di lingkungan bisnis.

Pengukuran efektivitas dan efisiensi operasional sangat krusial bagi bank syariah dalam meningkatkan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Rahmany, 2017). Berikut adalah penerapan pengukuran tersebut dalam pembiayaan UMKM, berfokus pada teknologi dan manajemen risiko: (1) Digitalisasi Proses Pembiayaan: Bank syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan menerapkan teknologi digital untuk pengajuan dan pencairan pembiayaan. Penggunaan platform online dan aplikasi seluler mempercepat proses, memungkinkan nasabah mengakses layanan kapan saja. Efisiensi diukur dari waktu pemrosesan aplikasi dan tingkat keberhasilan pengajuan. (2) Analisis Data dan Big Data: Dengan menggunakan analisis data dan big data, bank syariah dapat menilai kinerja pembiayaan dan perilaku nasabah. Data ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik mengenai produk pembiayaan, serta meminimalkan risiko gagal bayar melalui penilaian risiko yang lebih akurat. (3) Manajemen Risiko Pembiayaan: Bank syariah perlu melakukan identifikasi dan analisis risiko yang dihadapi UMKM, seperti risiko kredit dan pasar. Metode mitigasi risiko, seperti pemberian jaminan alternatif, dapat meningkatkan keberhasilan pembiayaan. Efektivitas diukur dari tingkat kepatuhan peminjam, sementara efisiensi dievaluasi melalui pengurangan biaya terkait kredit macet. (4) Peningkatan Kapasitas SDM: Efektivitas operasional juga tergantung pada kemampuan sumber daya manusia (SDM). Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penilaian risiko dan layanan nasabah. Kinerja karyawan dapat diukur dari dampaknya terhadap kepuasan nasabah dan pengurangan waktu dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Artikel ini menekankan bahwa efisiensi operasional bank syariah memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Mengingat kontribusi signifikan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sangat penting bagi bank syariah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sektor ini dalam mengakses pembiayaan formal. Beberapa strategi yang diusulkan, seperti digitalisasi layanan, pemanfaatan fintech syariah, serta penggunaan big data dan kecerdasan buatan, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional bank syariah.

Di samping itu, penguatan iklim usaha dan peningkatan kapasitas kewirausahaan juga menjadi elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga memiliki peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan, meskipun mereka harus menghadapi tantangan internal yang perlu diatasi. Pengelolaan risiko dalam pembiayaan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengurangi risiko kredit macet.

Secara keseluruhan, kombinasi antara efektivitas dan efisiensi operasional bank syariah, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sangat diperlukan untuk mencapai tujuan strategis dan meningkatkan daya saing di pasar. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bank syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan UMKM di Indonesia.

### Saran

Berdasarkan analisis dalam artikel ini, ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional bank syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM di Indonesia. Pertama, bank syariah perlu terus mengembangkan dan memperluas penggunaan teknologi digital, termasuk aplikasi mobile dan platform online, untuk memudahkan UMKM mengakses layanan perbankan dengan cepat dan efisien. Kedua, penting bagi bank syariah untuk menciptakan produk pembiayaan inovatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti skema pembiayaan berbasis bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) yang menawarkan pembagian keuntungan dan risiko yang lebih adil. Selanjutnya, investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menilai risiko dan memberikan layanan nasabah yang lebih baik, melalui program pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, bank syariah sebaiknya menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan mikro (LKM) untuk memperluas akses pembiayaan kepada UMKM, terutama di daerah yang kurang terlayani. Terakhir, penerapan sistem pengelolaan risiko yang lebih efektif sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet, dengan memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan dalam penilaian risiko untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

## Daftar Pustaka

- Billytona, C., Rizal, M., Khoiriyah, M., Kurnia, D., & Oktavia, R. (2024). Pemanfaatan Teknologi dalam Perkembangan Operasional Perbankan Syariah. *Economic and Business Management International Journal*, 6(2), 113–119.
- Budi gautama Siregar, Aswadi Lubis, & Muhammad Salman. (2023). Efisiensi Operasional Bank Umum Syariah. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(2), 264–278. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i2.8571>
- Dessy, B., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2024). Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja dan Keputusan Pembiayaan: Tinjauan Teoritis. *Jurnal Mu'allim*. <https://repository.uin-malang.ac.id/18470/>
- Ermawijaya, M. (2018). IMPLEMENTASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI DISESUAIKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NOMOR 12/Per/M.KUKM/IX/2015 (STUDI KASUS KOPERASI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 1(2), 32–51.
- Fitriasari, Fi. (2017). Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Malang Proceeding*, August, 133–149. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26869.88801>
- Jefry Katili. (2013). Analisis Varians Biaya Operasional Dalam Pengukuran Efektivitas Pengendalian Biaya Operasional PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). *Jurnal EMBA*, 1(4), 1262–1273.
- Mamun, S., & Ningsih, T. H. (2021). Implementasi Strategi Layanan Teknologi Digital Banking dan Service Quality dalam Perspektif Nasabah pada Perbankan Syariah (Study kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Tomang). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(02), 223–233. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i02.249>
- Pramono, N. H. (2013). Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(4), 154–162.
- Rahmany, S. (2017). Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6(2), 193–222.
- Rahmatullah, M. (2022). Merger Bank Syariah Indonesia Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk. 03/2019. *Jurnal Articiel*, 2.
- Rifki, M., Kiptiyah, M., Putri Aggraini, D., Relanda Putra, T., Raya Telang, J., Kamal, K., Bangkalan, K., Timur, J., & Penulis, K. (2024). PT. Media Akademik Publisher OPTIMALISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH. *Jma*, 2(6), 3031–5220.
- Safitri, R., & Zulfa, D. S. (2022). Pengaruh budaya organisasi dan burnout terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada Bank Muamalat Malang. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 329–342. <http://repository.uin-malang.ac.id/15048/>
- Saputra, H. M. G. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan literature review. *El Mudhorib: Journal of Islamic Economics and Islamic Banking*, 3(2), 131–148. <http://repository.uin-malang.ac.id/15325/>

- Suretno, S., & Bustam, B. (2020). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada Umkm. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>
- Suri, A. A., & Berliana, A. (2023). Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 850–863.
- Susila, J. (2017). Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.497>
- Werdi Apriyanti, H. (2018). Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan. *Maksimum*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>